

Di antara yang Konkret dan Abstrak: Esensi Integrasi dan Identitas Nasional

Kusuma

Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Indonesia

Email: kusuma@idu.ac.id*

*Korespondensi



Received: 10-02-2024, Revised: 28-05-2025, Accepted: 28-05-2025, Published: 30-05-2025

Abstrak

Tujuan penelitian ini menganalisis implementasi kekuasaan negara melalui pemerintahan sipil dalam menjalankan politik abstrak dan politik konkret untuk mewujudkan integrasi dan identitas nasional. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan. Penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memberikan arahan atau menghasilkan politik yang abstrak, termasuk seperti yang ditunjukkan pada kebijakan penambahan pahlawan baru dari daerah-daerah di Indonesia. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah dalam menumbuhkan dan memperkuat nilai-nilai patriotisme, kepahlawanan, dan rasa memiliki terhadap semangat kebangsaan Indonesia sebagai jati diri bangsa. Kebijakan abstrak tidak mengacu pada objek material. Outputnya adalah kebahagiaan, kejujuran, kebebasan, keterlibatan, dan kebersamaan. Sedangkan kebijakan konkritnya meliputi pembangunan infrastruktur terpadu, pabrik, kawasan industri, jasa, dan pariwisata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Keduanya harus terjadi secara seimbang. Aspirasi, harapan, dan pesan dari daerah bisa bersifat positif dan memperkuat kerja yang dilakukan pemerintah, dibandingkan tanggapan negatif yang terkesan mendekonstruksi apa yang sudah, sedang, dan akan dilakukan pemerintah.

Kata Kunci: identitas nasional; industrialisasi; pahlawan

Abstract

The purpose of this study is to analyze the implementation of state power through civil government in carrying out abstract politics and concrete politics to realize national integration and identity. The method used is a literature study. The study shows that the government provides direction or produces abstract policies, as shown in the policy of adding new heroes from regions in Indonesia. This shows the government's efforts to foster and strengthen the values of patriotism, heroism, and a sense of belonging to the spirit of Indonesian nationality as the nation's identity. Abstract policies do not refer to material objects. The output is happiness, honesty, freedom, involvement, and togetherness. Concrete policies include the development of integrated infrastructure, factories, industrial areas, services, and tourism to encourage economic growth, employment, and poverty alleviation. Both must occur in a balanced manner. Aspirations, hopes, and messages from the regions can be positive and strengthen the work done by the government, compared to negative responses that seem to deconstruct what the government has done, is doing, and will do.

Keywords: heroes; national identity; industrialization



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan untuk menetapkan 4, 5, hingga 6 pahlawan nasional baru pada setiap tahunnya.¹ Kegiatan ini tentunya merupakan salah satu dari tindakan Negara untuk menjaga dan memelihara gerak orbital daerah-daerah kepada Negara atau Pusat. Kegiatan ini merupakan produk turunan dari sejarah nasional yang diarahkan kepada orientasi historiografi Indonesia sentris. Tentunya ini dengan pamaknaan bahwa Negara memiliki otoritas dan peran untuk menanamkan aspek kesejarahan sebagai bagian dari upaya pewarisan nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan bangsa. Topangan studi sejarah yang semakin variatif maupun filsafat sejarah nasional yang semakin kuat telah semakin mematangkan arah dan visi kebangsaan Indonesia. Buktinya, tidak sedikit pula para tokoh maupun elite bangsa yang menyempatkan diri atau beraudiensi dan bertanya kepada para sejarawan yang kompeten di bidangnya dalam hal-hal yang terkait sejarah Indonesia maupun kawasan.

Pasca era studi sejarah yang digaung-kembangkan oleh mahaguru sejarah Prof. Sartono Kartodirdjo, jurusan sejarah yang ada di universitas maupun ilmu keguruan juga telah semakin mengelaborasi unit-unit sejarah, sehingga semakin tercipta volume sejarah lokal dengan kategori sejarah yang juga semakin variatif dan kaya—sejarah bahari, sejarah sungai, beserta sejarah kecil (*le petit histoire*) berupa sejarah kuliner dan makanan, sejarah kampung, bioskop, sejarah rumah sakit—melengkapi studi sejarah terdahulu yang berorientasi *big narrative* seperti sejarah nasional, sejarah biografi, atau sejarah komparatif. Bahkan semakin intensifnya perluasan kajian maupun persebaran studi sejarah di perguruan tinggi di kota-kota di Indonesia, telah dihasilkan banyak sarjana, dari strata satu hingga doktoral. Dan mereka ini telah mengabdikan diri secara profesional di instansi-instansi pemerintah terkait, baik sipil maupun militer, di unit pendidikan, di ranah jurnalistik, di ranah konsultan maupun cendekiawan publik yang mandiri, yang tetap meletakkan sejarah sebagai *passion* maupun titik tolak dalam menilai, memperkuat, sesekali mengkritik, sesekali mengafirmasi (memperkuat), juga mengevaluasi atas jalannya arah dan visi kebangsaan dan kenegaraan Indonesia.

Salah satu “warisan” bahasan Sartono Kartodirdjo adalah makalah berjudul “Fungsi Sejarah dan Kesadaran Sejarah dalam Pembangunan Bangsa” (Kartodirdjo, 1994, pp. 55-66). Dalam makalah ini, ia memaparkan proses menyejarah bangsa Indonesia yang dimulai dari tahapan mistis, ketika sejarah tradisional disikapi dengan model mitos. Padahal belum mampu melepas diri dari pandangan dunia kosmogonis atau religio-magis. Sehingga, waktu masih disikapi secara siklis, berulang tanpa ada perubahan secara kualitatif maupun kuantitatif, kecuali berputar pada lingkaran itu, yang akan disegar-perbarui dengan upacara (*ritus*). Ia tidak akan membawa ke mana-mana. Kesadaran palsu ini lalu tersingkap, surut, dan

¹ Para tokoh pahlawan nasional ini diambil dari berbagai daerah di Indonesia, setelah mengalami proses penilaian dari tim peneliti dan pengkaji gelar daerah di setiap provinsi masing-masing. Lalu nama-nama yang diloloskan oleh TP2GD dari setiap daerah, para calon pahlawan ini akan diserahkan dan dinilai oleh TP2GP atau Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat. Dari TP2GP, perjalanan para calon ini diserahkan dan dinilai lagi kepada Dewan Gelar, dan selanjutnya, perjalanan para calon pahlawan ini sampai di meja Presiden. Presiden akan memilih 4-6 di antara puluhan calon yang disodorkan itu, yang kemudian akan diumumkan pada bulan November pada setiap tahunnya.

datanglah “kesadaran sejarah”, manakala “waktu” disikapi dengan kesadaran retrospeksi dan introspeksi. Prof. Sartono menyebut “Lahirnya Boedi Oetomo” sebagai fajar kesadaran sejarah bangsa, yang mengarah kepada revivalisme nasional, yang disimboliskan sebagai bang-bang wetan, tanda kemunculan matahari di timur yang mencerahkan. Kesadaran nasionalitas yang memutus perjuangan spatial dan kosmogonis itu bermuara kepada kemerdekaan RI, sebuah jembatan emas yang mengantarkan Indonesia menjadi bangsa yang semakin terintegrasi, yang darinya kemudian memupuk, membina, dan melanjutkan proyek identitas nasionalnya.

Tujuan penelitian ini menganalisis implementasi kekuasaan negara melalui pemerintahan sipil dalam menjalankan politik abstrak dan politik konkret untuk mewujudkan integrasi dan identitas nasional. Penelitian ini memiliki nilai penting dalam perspektif sejarah, karena menunjukkan bahwa aspirasi, harapan, dan pesan dari daerah dapat memberikan dampak positif serta memperkuat upaya pemerintah, dibandingkan dengan tanggapan negatif yang cenderung mendekonstruksi kebijakan serta langkah-langkah yang telah, sedang, dan akan diambil..

Metode

Kita akan mendiskusikan bagaimana sosok-tokoh yang berdedikasi itu diusulkan menjadi pahlawan nasional, setidaknya yang masuk di TP2GD DKI Jakarta, di mana di situ penulis terlibat sebagai salah satu anggota tim peneliti. Proses penulisan ini disusun melalui studi literatur, terutama mencatat dan mengidentifikasi proses pengajuan, kendala-kendala yang ditemui, juga darimana sumber dan latar belakang sosial para tokoh calon pahlawan itu diajukan. Bagaimana pula proses seleksi yang dilakukan oleh peneliti yang rata-rata terdidik sebagai sejarawan ini?

Tulisan ini merupakan upaya paralelisasi (penyejajaran) dengan pendekatan yang dilakukan Prof. Sartono perihal integrasi dan identitas nasional, utamanya yang telah dilakukan dalam proses berbangsa dan bernegara oleh tokoh-tokoh yang sudah anumerta yang dicalonkan sebagai pahlawan nasional. Sampai sejauh mana para pahlawan beserta nilai kepahlawanan ini kemudian bergema atau tersosialisasi, perangkat Hegelian dan Ferdinand de Saussure dalam penanda (signifier) dan petanda (signified) coba untuk dikemukakan.

Hasil dan Pembahasan

Para calon pahlawan nasional, atau calon penerima penghargaan berupa gelar, tanda jasa atau tanda penghargaan, yang dibahas di dalam rapat-rapat tim TP2GD DKI Jakarta, merupakan usulan yang bisa diajukan oleh perseorangan, lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah, organisasi, atau kelompok masyarakat (sesuai dengan pasal 30, UU No 20 Tahun 2009). Terkait dengan gelar dan jenis gelar yang terkait dengan kepahlawanan, termaktub dalam dua pasal. Pertama, pada Bab I Ketentuan umum Pasal 1, Gelar adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darmabakti, dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan Negara; kedua, Bagian 1, pasal 4, Gelar berupa Pahlawan Nasional.

Dalam hal ini TP2GD DKI mengikuti ketentuan umum perihal siapa yang disebut pahlawan ini sebagaimana tertera dalam pasal-pasal termaksud.

Selanjutnya, bagi pihak-pihak yang hendak mengajukan tokohnya, mereka harus mendapatkan rekomendasi dari Gubernur kepala daerah dan Surat Pengantar dari Dinas Sosial Provinsi (secara berjenjang). Kepada pengusul, mereka diharuskan menyusun naskah akademis terkait kepribadian, perjuangan, dan keluarbiasaan dedikasi sang tokoh dalam membela bangsa dan negara.

Adapun prinsip yang diterapkan bagaimana para calon pahlawan nasional melewati kurasi, ada beberapa hal perlu dicatat.² Pertama, tokoh harus real, tidak fiktif, apalagi terselimut lebih dominan kisah mitosnya daripada realitasnya. Dengan demikian, studi historis berbasis data dibutuhkan, agar yang muncul dan berjuang, adalah tokoh dan perjuangan yang terkawal secara nyata-historis. Tidak diperkenankan kalimat atau ruang yang disebut secara spekulatif tanpa adanya bukti. Misalnya, menyebut “bunga pertempuran” kepada seseorang, tidak boleh berdasarkan persepsi dan penilaian sang penulis naskah yang telah berjarak dengan sang tokoh, melainkan pujian tersebut harus menyebutkan sumber autentik darimana sebutan penting itu diperolehnya.

Kendatipun, ada stori bagaimana seorang pelukis disewa untuk menggambar sang tokoh berabad lalu yang tidak meninggalkan gurat wajahnya. Uniknya, selain sang pelukis, pemesan gambar juga menyewa paranormal yang mendapat informasi gaib bagaimana wajah sang tokoh tersebut, bahkan si perantara dengan makhluk gaib itu bisa terhuyung karena merasa ditempeleng oleh informan gaib yang merasa bahwa detail-detail wajah yang dilukis sang pelukis tidak pas. Yang lainnya berasal dari info mimpi, yang dirasakan secara subjektif oleh narasumber atau informan yang bersangkutan kala merasa ditemui oleh tokoh historis yang tidak meninggalkan rupa wajahnya.

Kedua, calon pahlawan yang diajukan harus tidak boleh cacat atau terdistorsi perjuangannya. Akan menjadi cacat secara hampir permanen apabila yang bersangkutan sampai disebut “pengkhianat” bangsa, yang dibuktikan dan diperkuat dengan vonis pengadilan pada tingkat yudisial terakhir. Sementara pemenjaraan, rehabilitasi semodel amnesty, abolisi, masih bisa menjadi pertimbangan agar penilaian berubah. Bukankah para pahlawan bangsa itu sebagian juga mantan narapidana ketika mereka melawan rezim kolonial? Tentunya ini akan menjadi relatif dalam waktu yang berbeda, karena tidak semua berjalan sempurna. Lagipula, seorang tokoh bukanlah malaikat. Seorang St Augustine, peletak dasar doktrin gereja abad pertengahan, atau juga Umar bin Khattab, khalifah masyhur dari dunia Islam, pada masa mudanya adalah seorang yang pernah terjebak dalam dosa.

Ketiga, secara resmi, jumlah pahlawan nasional kita ada 168 orang hingga tahun 2023 ini, dan setiap tahun akan terus ditambahkan. Semasa hidupnya, profesi dan kedudukan sosial para pahlawan ini beragam: raja-bangsawan, tokoh militer/kepolisian, tokoh agama, politisi, ilmuwan, pendidik, seniman- budayawan. Mereka tersebar secara gender dan zaman yang berbeda dan aneka daerah di Indonesia. Keempat, secara teknis, pencalonan sebagai pahlawan nasional dilakukan oleh daerah-daerah yang padanya terdapat sosok-sosok teladan untuk diangkat. Kurun para calon pahlawan itu membentang luas, seluas perjuangan

² Sekalipun demikian, tulisan ini merupakan refleksi pribadi penulis, bukan menjadi pandangan atau sumber kebijakan kelembagaan maupun kolektif dari tim TP2GD DKI Jakarta.

historis bangsa Indonesia. Sehingga mereka diangkat tidak sesuai kronologi waktu, selain karena persoalan waktu kewafatan, perbedaan kurun waktu berjuang, dan kemungkinan untuk dieksplorasi tapak perjuangan historisnya maupun momentum saat mereka hendak diangkat juga berbeda-beda. Misalnya, dalam pengangkatan pahlawan nasional oleh Presiden pada tahun 2023, 5 pahlawan nasional yang diangkat, secara kurun dan model perjuangan, hampir sama dan sebaya. Mereka adalah Almarhum Dr. dr. H. R. Soeharto, dari Jawa Tengah, dokter pribadi Bung Karno; Almarhum KGPAA Paku Alam VIII, dari Daerah Istimewa Yogyakarta, pejuang integrasi serta menjadi tuan rumah bagi Presiden dan Wakil Presiden RI pertama; Almarhum dr. R. Rubini Natawisastra, dari Kalimantan Barat, seorang dokter asal Sunda yang membaktikan diri sebagai dokter di Kalbar dan gugur pada 1944 oleh penghukuman mati penjajah Jepang; Almarhum H. Salahuddin bin Talabuddin, dari Maluku Utara, memimpin perjuangan fisik melawan Belanda dan dieksekusi mati pada 1948; dan Almarhum K.H. Ahmad Sanusi, ulama, penulis ratusan kitab agama dari Jawa Barat, anggota BPUPKI yang turut melahirkan dasar Negara Pancasila pada 1945 dan Komite Nasional Indonesia (KNI) (Medcom, (2022)).

Sementara pada 10 November 2021, Presiden menerbitkan Kepres Nomor 109 dan 110 TK Tahun 2021 yang menganugerahkan 4 pahlawan nasional, mulai dari raja hingga sineas, dalam kurun waktu yang berbeda-beda hingga medan juang yang berbeda, yakni: Tombolotutu dari Sulawesi Tengah; Sultan Aji Muhammad Idris dari Kalimantan Timur; Usmar Ismail (sutradara film), dari DKI Jakarta; dan Raden Aria Wangsakara dari Banten (Farisa, 2021). Kehadiran para pahlawan dari berbagai kurun waktu, profesi atau medan pengabdian, dan kedudukan sosial yang berbeda, dan serta secara historis, bukan tokoh mitos, dapat ditelusuri keberadaan dan puncak perjuangannya, adalah upaya pemerintah (Pusat) untuk mengintegrasikan bangsa yang terdiri dari aneka suku bangsa, budaya, agama, dan kepercayaan, yang membentang dari Sabang hingga Merauke, dari Talaud hingga Rote. Tugas generasi kini dan mendatang adalah memperhalus dan menyempurnakan bangunan batu-bata integrasi yang telah ditata oleh generasi terdahulu. Boedi Oetomo sebagai tonggak awal historis-simbolis juga telah disambung- rangkakan dengan tokoh-tokoh utama dari daerah yang telah dinasionalkan ini.

Integrasi secara simbolis ini hendaknya didayagunakan secara optimal dan didekatkan secara emosional kepada generasi penerus sehingga mengokohkan bangunan nasional. Bila meminjam teori penanda (signifier) dan petanda (signified) dari Ferdinand de Saussure (Mawardani, 2021; Kridalaksana, 2005),³ para tokoh pahlawan nasional ini bila diekstrak secara optimal dengan model tematik dan berkelanjutan, baik dengan sarana penulisan buku, diskusi, pementasan drama, akan memperkaya wawasan kebangsaan. Apalagi sediaan atau hasil penulisan sejarah lokal, nasional, maupun kajian filsafat sejarah nasional telah relatif mencukupi untuk memperkuat basis integrasi nasional secara intelektual. Katakanlah bila akan membahas Usmar Ismail. Usmar Ismail adalah signifier,

³ Secara shortcut, melalui paralelisasi penulis meminjam pendekatan penulis di atas yang memakai teori tokoh linguistik asal Jenewa ini untuk membedah dan mengoptimalkan para pahlawan nasional kita ini kepada generasi penerus. Untuk bacaan lebih lanjut pada tokoh strukturalisme dan linguistik modern ini.

penanda. Lalu asosiasi yang dikaitkan dengan Usmar Ismail sebagai signified, adalah perfilman nasional, evolusi bahasa nasional, maupun segi-segi perjuangan bersenjata antara tentara Belanda dengan TNI di dalam film-film perjuangan nasional besutan Usmar, seperti: Enam Jam di Jogja (1951); Lewat Jam Malam (1954); dan Anak-Anak Revolusi (1954). Contoh lain adalah penokohan Prof. Dr. Ir. Herman Johannes. Ia adalah pahlawan nasional yang diangkat oleh Presiden Yudhoyono pada 2009. Ia merupakan cendekiawan yang mengajar di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ia lahir di Rote, NTT pada 26 Mei 1912. Dengan bakat dan kepandaianya, ia dikirim untuk bersekolah di Technische Hooge School (THS), Bandung, jurusan teknik sipil. Namun sebelum lulus, Belanda dikalahkan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, hingga Herman Johannes tidak sempat meluluskan dirinya karena sekolah ditutup oleh Jepang. Ia baru mendapat gelar Insinyur saat Sekolah Tinggi Bandung ini dipindah ke Jogjakarta, tepatnya di bilangan Kotabaru (sekarang menjadi SMAN 3 Yogyakarta), ibukota revolusi Republik Indonesia (Admin, n.d.).

Herman Johannes adalah signifier, penanda. Lalu asosiasi yang dikaitkan dengan Herman Johannes sebagai signified, adalah ilmuwan, gerilyawan, pencipta bom asap, granat, dan pemasang bom di jembatan-jembatan (kereta api maupun kendaraan) di wilayah sekitar Jogja, saat ibukota Jogja diduduki oleh pasukan Belanda. Kisah patriotisme, kepandaian dalam ilmu teknik, mengalahkan atau menghambat pergerakan militer Belanda yang lebih canggih dan modern, adalah petanda-petanda yang bisa dikembangkan. Berkat Johannes-lah, kecanggihan membuat bom asap dan granat sebagai seorang insinyur, pembuatan arang briket batubara, yang relatif awet dan murah dibandingkan minyak tanah yang makin mahal pada masanya, juga pernah meneliti kemungkinan penggunaan lamtoro gung, nipah, widuri, limbah pertanian, dan gambut sebagai bahan bakar, merupakan sumbangan pahlawan sekaligus prajurit TNI ini. Pasca-Perang Kemerdekaan, Ir. Johannes meninggalkan dunia kemiliteran dan pabrikasi teknik untuk memenuhi panggilan hidupnya yang autentik, yakni menjadi seorang ilmuwan (terakhir menjadi guru besar di Fakultas Teknik UGM). Ia wafat pada 1992.

Kita bisa mensimulasikan pahlawan Frans Kaisiepo dari Papua, Nani Wartabone dari Gorontalo, Brigjen Tjilik Riwoet dari Kalimantan Tengah, dan sebagainya. Sedikit contoh untuk pengembangan nilai kepahlawanan dalam bentuk simulasi tersebut demi mengaktualkan dan mengkontekstkan nilai kepahlawanan kepada generasi penerus yang bisa jadi sebagian telah terpisah jauh dengan masa generasi yang bersangkutan. Dengan penyesuaian teknologi, bahasa dan imajinasi teknik drama, rangkaian nilai kepahlawanan yang telah berhasil digali dari fakta historis dan dituliskan dalam bentuk naskah ilmiah akademik itu pun hidup kembali dengan cara yang lebih ringan dan populer. Apa yang terangkat tadi merupakan mentifact atau fakta yang menjadi unsur fundamental dari proses perkembangan nasionalisme, yang ruh-jiwanya diserap dari puncak keteladanan lokal, lalu diintegrasikan dan kemudian disajikan sebagai “pengalaman bersama” bangsa, sekaligus sebagai guidance bagi proses penguatan dan peneguhan identitas nasional (Indrawan, 2017).⁴

⁴ Selaku perwira sejarah di Pusjarah TNI, Jakarta, penulis pernah terlibat dalam penulisan naskah drama “Perjuangan Jenderal Soedirman” dalam drama kolosal yang menceritakan

Yang perlu diyakini bahwa sampai kini, bangunan nasional relatif kuat. Tujuh puluh depapan tahun semenjak Indonesia merdeka, sejarah sebagai ilmu dan kajian ilmiah telah berdiri semakin mantap. Kajian sejarah yang semakin marak dalam pengungkapan unit sejarah (lokal, nasional, biografi, komparatif), kategori sejarah (sosial, politik, kebudayaan, mentalitas, intelektual, agraria), juga dengan pengayaan interdisipliner (Kartodirdjo, 2016) dan filsafat sejarah “nasional” (Kuntowijoyo, 2008, pp. 358-379; Kuntowijoyo, 1997, pp. 20-23, 79-84),⁵ telah memberikan bekal kokoh bagi arah dan nilai-nilai kebangsaan. Proses emansipasi dan egaliterisasi berkat pendidikan dan pergaulan yang inklusif, seyogianya semakin bertambah besar pula.

Proses perjalanan kebangsaan ini tampak bersifat evolutif, yang bergerak secara linear dan rasional, bukan cyclical, menuju pada titik pemajuan, baik secara spiritual maupun fisik. Dua contoh yang bisa mewakili adalah perjalanan dari masa titik kebangkitan nasional, yang oleh Prof. Sartono sebagai revivalisme nasional. Pertama, “Politik Etis” atau Utang Budi yang dirancang oleh anggota parlemen dari kalangan etis di tanah Hindia sebagai upaya memperbaiki kesejahteraan masyarakat jajahan yang telah mengalami pemiskinan dan kebodohan akibat eksploitasi tanpa memberi kompensasi. Dalam hal ini, kelompok priyayi rendah Jawa, yang relatif teremansipasi dengan pendidikan dokter pribuminya, mendirikan Budi Oetomo, organisasi modern pertama di Hindia sebagai cara menyikapi fajar atau zaman baru ini. Berbagai gagasan disampaikan dan berjalan relatif kencang, seperti pentingnya keterpelajaran, pentingnya menengok budaya warisan agung Jawa, pentingnya berhimpun, pentingnya saling menolong antarlapisan pribumi demi pemajuan Jawa lewat fond (dana beasiswa) (Nagazumi, 1989, pp. 26-39).

Lewat dinamika antara pemerintahan kolonial, pemerintah Den Haag, dan aktor-aktor yang bermain di kancah Hindia Belanda, tujuan luhur tersebut, dibelokkan menjadi kepentingan modal swasta, kepicikan birokrat rendah Belanda, serta aktivis ideologis semacam tokoh buruh dan kaum Kiri, yang saling berkelindan namun juga turut membentuk dinamika. Alhasil, di antara pribumi yang terdidik secara Belanda ini, ada yang menyeberang menjadi cendekiawan mandiri atau bebas. Lebih daripada itu, mereka mendedikasikan dirinya sebagai aktivis pengkritik keras sistem dan visi kolonial yang tidak memberi kesempatan bagi anak negeri untuk berperan optimal, bahkan tidak ada kehendak dari negeri induk untuk memberi otonomi longgar, terlebih-lebih merdeka dari kolonial (van Niel, 1984).

perjuangan Panglima Jenderal Soedirman, yang dipentaskan pada HUT TNI ke-72. di Dermaga Pelabuhan Pantai Indah Kiat, Cilegon, Banten, Kamis (5/10/2017).

⁵ Kuntowijoyo, sekalipun ia mengalamatkan tulisannya pada kesadaran evolusioner umat (Islam), arahnya yang terinspirasi dari Hegel atau sosiolog August Comte ini memperlihatkan arah filsafat sejarah nasional, ketika masyarakat Indonesia telah meningkat level kesadarannya, yang semula dari kesadaran mistis, lalu ideologis, dan kemudian memuara kepada kesadaran teknikal-ilmu; seiring emansipasinya, yang semula secara hierarki sosial sebagai kawula, lalu wong cilik, dan kemudian memuara kepada kesadaran warganegara. Kesadaran warganegara adalah kesadaran tertinggi, arena yang bersangkutan memahaminya secara logis-rasional, dan menempatkan diri sebagai pribadi yang kritis serta penuh tanggung jawab.

Kedua, emansipasi lebih lanjut di masa kolonial adalah emansipasi yang diperkenalkan oleh kaum pergerakan. Munculnya Sarekat Islam, yang mengklaim bermassa 15 juta orang, merupakan masa bersemi para “wong cilik” ini berperan serta dalam isu-isu kemasyarakatan dan kebijakan kolonial, hal yang tidak atau belum mereka dapatkan di masa lalu, kecuali dilibatkan dalam konflik bersenjata. Sekalipun di kalangan petani, rakyat desa anggota SI ini menganggap pemimpinnya sebagai penjelmaan Ratu Adil, apalagi nama Tjokro mengingatkan pada tokoh messiah mistis, Erucokro, sebagaimana nama ini disematkan pada Pangeran Diponegoro di masa perang Jawa. Tampak mencolok adalah gerakan Muhammadiyah, suatu organisasi modern yang beranggotakan para santri kota, dengan latar belakang pedagang atau kelas menengah. Perjuangan bersifat kelembagaan ini memperlancar perjuangan secara agregatif.

Dengan demikian, ketika kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan, dan telah berjalan selama 78 tahun ini, masyarakat Indonesia telah meningkat menjadi warganegara secara penuh. Otonomi pribadi dan proses emansipatoris yang semula mula-mula hanya menjadi milik para intelektual, kini di masa revolusi digital ini, seharusnya mengemansipasi “setiap orang dalam kesadarannya sebagai warganegara”. Terminologinya bahkan meluas, bukan semata citizen melainkan netizen. Bila citizen atau warganegara masih dikoridori oleh batas wilayah teritorial, kebangsaan, naungan Negara, tidak demikian dengan netizen, yang pergaulannya telah melintas batas bangsa dan Negara lewat kecanggihan internet yang didukung oleh artificial intelligent yang semakin cepat dan cerdas. Remaja milenial tidak perlu keluar dari kamarnya untuk berinteraksi dan mampu bercakap dengan bimbingan translater tools dalam bentuk tulisan maupun bunyi, bertukar pengalaman sampai foto dan gambar bergerak, bahkan mengadakan pertandingan virtual seperti catur, kartu, car racing, dan sebagainya.

Dahulu, seorang filsuf Amerika, Francis Fukuyama menengarai kemenangan pihak kapitalis liberal sebagai akhir dari sejarah, end of history. Apalagi hal ini telah didukung pula oleh teknologi AI yang mampu menyatukan segenap umat manusia di bumi ini. Ternyata tidak demikian. Sebelum internet sebagai perkakas dari gelombang revolusi keempat (Schwab, 2019, pp. 2-3),⁶ terdapat Negara yang mengalami disintegrasi oleh persoalan identitas, seperti Yugoslavia dan Uni Soviet, pada tahun 1990-an. Gerakan-gerakan bersifat sentripetal yang mengatasnamakan etnosentrisme, atau kebangsaan etnis, mengambil jalan untuk melepaskan diri dari

⁶ Untuk penjelasan revolusi keempat, yang disebut sebagai kemajuan artificial intelligent, setelah melalui gelombang revolusi industri, revolusi Revolusi Industri pertama, 1.0, merupakan penanda pertama perubahan besar setelah revolusi agraris yang telah berjalan lamban semenjak waktu 10.000 tahun. Revolusi 1.0 berlangsung dari tahun 1760-an hingga 1840-an. Dipicu oleh pembangunan jalur kereta api dan penemuan mesin uap, revolusi ini membawa pada era produksi mekanis. Revolusi Industri kedua, 2.0, yang dimulai pada akhir abad ke-19 hingga akhir abad ke-20, memungkinkan dilakukannya produksi massal, yang berkembang dengan ditemukannya listrik dan sistem perakitan. Revolusi industri ketiga, 3.0, dimulai sekitar tahun 1960. Revolusi ini bisa disebut revolusi komputer atau digital karena dorongan pengembangan semikonduktor, komputer bingkai utama (1960-an), komputer pribadi (1970-n dan 1980-an), serta internet. Revolusi Industri keempat, 4.0 telah dimulai pada tahun peralihan abad ini, yang dibangun dengan revolusi digital. Beberapa ciri dapat disebutkan: internet yang semakin meluas dan ringkas, sensor buatan yang semakin kecil dan kuat dengan harga lebih murah, dan dengan kecerdasan buatan dan mesin pembelajar yang semakin maju/canggih.

kepengapan nasionalitas yang sebelumnya telah menghimpun dan menginspirasi segenap etnis.

Patut pula diwaspadai persistensi revivalisme bersifat etnis maupun gerakan messianistik akibat ketidakpuasan kepada kebijakan Negara. Gerakan etnosentris ini hampir menyerupai kejadian di masa 1990an lalu, di mana Erick Hobsbawm bahkan memberi gambaran yang suram, bahwa negara-bangsa ibarat kulit kerang, yang keras di luar namun lunak daging di dalamnya. Kendati, ia menganggap absurd bahwa hilangnya nasionalitas modern telah tampak, namun tetap perlu untuk dipikirkan (Hobsbawm, 1992, pp. 213-215). Selain itu, masalah keresahan masyarakat atas konflik tanah, ketika rakyat mendapati tanahnya yang dahulu aman dari gangguan dan secara geografis terpencil, kini menghadapi proyek strategi nasional tanpa merasa dilibatkan keberadaannya kecuali mereka harus terusir pergi dengan ganti rugi. Seolah nilai uang bisa dengan gampang mengganti tanah tumpah darah. Demikian kejadian yang baru saja disaksikan di Pulau Rempang, bagian dari Kepulauan Riau, yang akan dijadikan kawasan terpadu, industri, jasa, dan kepariwisataan, demi memanfaatkan segitiga pertumbuhan ekonomi wilayah Indonesia, Singapura, dan Malaysia (Metro TV, 2023).

Tertelannya nasionalisme kebangsaan modern oleh kecenderungan globalisasi, juga patut diperhitungkan. Masalahnya, yang terjadi adalah selubung ekonomi pasar bebas, ketika globalisasi diterjemahkan sebagai perpindahan atau relokasi modal secepat kilat, yang dilandasi oleh regulasi lingkungan yang ketat. Sehingga modal maupun pabrik yang dibangun di negara berkembang adalah instalasi yang sangat berpotensi mencemari lingkungan. Belum lagi ekstrak bahan pertambangan di dalam negeri, sehingga beban pencemaran pun bertambah.

Sejatinya, integrasi nasional bertujuan untuk mempertahankan keutuhan dan keberlangsungan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat dan mandiri. Integrasi Nasional meliputi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, menghormati keanekaragaman budaya dan agama, dan membangun rasa cinta tanah air yang kuat. Integrasi Nasional sangat penting bagi keberlangsungan dan kemajuan bangsa Indonesia, karena akan memudahkan dalam melakukan pembangunan, menjaga stabilitas politik, sosial dan ekonomi, serta memperkuat posisi Indonesia di mata dunia internasional.

Kesimpulan

Kebijakan pemerintah yang mengedepankan kesatuan dan kebersamaan bangsa Indonesia seperti Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika, menjadi faktor penting dalam memperkuat integrasi nasional. Kebijakan-kebijakan pemerintah terdiri dari yang konkret dan yang abstrak. Kebijakan yang konkret antara lain, pembangunan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan. Sementara kebijakan yang bersifat abstrak mengacu pada konsep tidak hadir sebagai objek material, seperti kualitas, tindakan, dan proses. Keluarannya adalah kata seperti kebahagiaan (*happiness*), kejujuran (*honesty*), dan kebebasan (*liberty*)

Karena tugas dan fungsinya, pemerintah maupun kekuatan sipil menjalankan keduanya, politics of the concrete dan politics of the abstract, yakni politik yang abstrak dan politik yang konkret. Keduanya harus berlangsung seimbang. Sudah menjadi kewajiban dan kerja pemerintah, untuk memberi arahan ataupun

memproduksi politik yang bersifat abstrak, antara lain sebagaimana ditunjukkan dalam kebijakan menambah pahlawan baru dari daerah-daerah di Indonesia. Ini memperlihatkan upaya pemerintah untuk menumbuhkan dan meneguhkan nilai-nilai patriotisme, kepahlawanan, dan rasa memiliki jiwa kebangsaan Indonesia. Aspirasi, harapan, dan pesan-pesan dari daerah bisa saja bersifat positif dan menguatkan kerja-kerja yang dilakukan pemerintah, namun juga respons negatif yang tampak mendekonstruksi apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh pemerintah.

Bagaimanapun, sebagai pemegang kekuatan optimal atas politik abstrak dan konkret, Negara, lewat representasi pemerintahan yang memegang amanah kekuasaan, akan menjalankan hal-hal yang konkret, seperti: pembangunan taman-taman publik, rumah sakit yang terjangkau, sekolah yang terjangkau dan berkualitas, atau pemenuhan kebutuhan pokok bagi segenap rakyat, pemilihan umum yang jujur dan adil. Bagi rakyat, adanya pembangunan infrastruktur transportasi atau sarana perhubungan, seperti jalan nasional dan jalan berbayar (tol), bandara dan pelabuhan laut; pembangunan kawasan terpadu dalam sektor industri, jasa, dan hiburan; fasilitasi dan afirmasi kepada kekuatan usaha kecil dan menengah (UMKM), dukungan kebijakan dan fasilitasi kepada kekuatan ekonomi besar untuk efisiensi perekonomian dan ujung tombak ekspor skala massif, dan sebagainya, akan terlihat pada seberapa besar hal-hal tersebut terkait dengan indeks kebahagiaan atau indeks kebebasan manusia, baik secara individual maupun kolektif. Bagaimanapun, apa yang dilakukan maupun kerja sama antarkomponen adalah masalah humanisasi (pemanusiaan) dan liberasi (pembebasan) dari jerat kemiskinan, penindasan, dan pengabaian sosial. Negara akan tampak hadir dan optimum bila Negara berhasil memadukan pembangunan yang bersifat abstrak dan konkret.

Referensi

- Admin, (n.d.). *Herman Johannes*. https://id.wikipedia.org/wiki/Herman_Johannes. Diakses pada 9 September 2023.
- Farisa, F. C. (2021). Jokowi Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional ke Empat Tokoh, Ini Daftarnya. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/10/10415951/jokowi-anugerahkan-gelar-pahlawan-nasional-ke-empat-tokoh-ini-daftarnya>. Diakses tanggal 8 September 2023.
- Hobsbawm, E. J. (1992). *Nasionalisme Menjelang Abad XXI (Terjemahan Hartian Silawati)*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Indrawan, A. F. (2017). HUT TNI Ke-72 Pentaskan Drama Kolosal Perjuangan Jenderal Sudirman. *Detik.com*. <https://news.detik.com/berita/d-3671151/hut-tni-ke-72-pentaskan-drama-kolosal-perjuangan-jenderal-sudirman>. Diakses tanggal 8 September 2023.
- Kartodirdjo, S. (1994). *Pembangunan Bangsa tentang Nasionalisme, Kesadaran dan Kebudayaan Nasional*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Kartodirdjo, S. (2016). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

- Kridalaksana, H. (2005). *Mongin de Saussure (1857-1913), Peletak Dasar Strukturalisme dan Linguistik Modern*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kuntowijoyo, (1997). *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Kuntowijoyo, (2008). *Paradigma Islam*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Mawardani, M. R. (2021). Penanda dan Petanda dalam Cerita Anak Kisah Samariona Karya Dahri Dahlan dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran Sastra Indonesia pada Sekolah Dasar. *Wahana Literasi: Journal of Language, Literature, and Linguistics*, 1(1). <https://ojs.unm.ac.id/wahanaliterasi/article/view/27461>.
- Medcom, (2022). 5 Tokoh Bangsa Penerima Gelar Pahlawan Nasional 2022. *Medcom.id*. <https://www.medcom.id/foto/grafis/5b2JlMb-5-tokoh-bangsa-penerima-gelar-pahlawan-nasional-2022>. Diakses tanggal 8 September 2023.
- Metro TV, (2023). Potret Usang Pembangunan di Pulau Rempang. *Metro TV*. <https://www.youtube.com/watch?v=RoAEmlfT4rQ>. Diakses tanggal 10 September 2023.
- Nagazumi, A. (1989). *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908-1918*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Schwab, K. (2019). *Revolusi Industri Keempat (Terjemahan Farah Diena & Andi Tarigan)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- van Niel, R. (1984). *Munculnya Elit Modern Indonesia (Terjemahan Ny. Zahara Deliar Noer)*. Jakarta: Pustaka Jaya.